

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, Bahrun. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bisma, I Dewa Gede, et al. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2003-2007*. Universitas Mataram: Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus. Vol. 4.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Fernanda, Wean. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Barat untuk Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Andalas Padang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendriyadi, S. 2011. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Antara Tahun 2008-2009*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Istyaningtias, Dian. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Jawa Tengah Tahun 2010-2014*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Pramita, Puput Risky. 2015. *Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Republik Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

_____. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

_____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

_____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

_____. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

_____. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Rizka, Miftahul. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Periode 2013-2015*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah*. Universitas Kristen Petra: Jurnal Akuntansi & Keuangan. Vol. 2.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

